



Judul : Hak Angket Harus Diseriusi
Tanggal : Jumat, 08 Maret 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Fraksi Partai NasDem fokus menguatkan substansi materi angket agar penggunaan hak tersebut tidak sekadar menjadi gimik politik.

Hak Angket Harus Diseriusi

CANDRA YURI NURALAM
redaksi@mediaindonesia.com

PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2024 kembali disebut sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah. Klaim itu didasari adanya dugaan orang kuat yang mengatur pemilu sampai pada tahap hasilnya serta terukunya banyak kecurangan yang terjadi selama proses Pemilu 2024 berjalan.

Karena itu, pengguliran hak angket di DPR menjadi agenda yang mesti diseriusi untuk mengklarifikasi dugaan-dugaan tersebut sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di pemilu yang akan datang. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) dalam diskusi politik di Kampus Universitas Indonesia, Depok, kemarin.

"Kita melihat dari berbagai pandangan, kemarahan, protes karena pemilu tidak transparan, banyak kecurangan, dan banyak hal yang menyebabkan

demokrasi tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan," ucap JK.

JK turut menyoroti adanya penggunaan bansos yang digerakkan saat pemilu. "Mulai masalah dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, hingga masalah bujukan. Gabungan dari semua itu tentu menyebabkan demokrasi terbeli oleh mereka yang punya kemampuan untuk menentukan (hasil) pemilu. Itu yang terjadi," terangnya.

Menurutnya, agar tidak terjadi masalah di masa yang akan datang, pengguliran hak angket menjadi sangat penting. Ia menilai hak angket baik untuk kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. "Hak angket diperlukan untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan pemilu supaya tidak terulang di pemilu yang akan datang. Tentu ini baik untuk kedua pihak."

Saat menanggapi hal itu, secara terpisah, anggota Fraksi Partai NasDem Taufik Basari

menegaskan lagi fraksinya tegas mendukung dan tetap memperjuangkan hak angket pemilu bisa terlaksana.

"Yang jelas Fraksi Partai NasDem sangat serius. Kami sedang mempersiapkan penguatan substansi hak angket. Karena itu, pada hari ini membuat *focus group discussion* mengundang para pakar untuk mendapatkan masukan," beber Taufik di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, penguatan substansi itu penting agar hak angket tidak sekadar menjadi gimik politik. Substansi hak angket perlu didiskusikan matang dan memuat argumentasi kuat. "Jangan sampai hak angket hanya jadi gimik karena substansinya *zong* atau enggak kuat argumentasinya."

Jangan saling tunggu

Pada kesempatan yang sama, pengamat politik Ray Rangkuti mendesak para pemimpin fraksi di DPR pendukung hak angket segera bertemu dan menjalin komunikasi. Ia menengarai di

tiap fraksi belum terbangun kepercayaan. Itu yang membuat pengguliran hak angket mandek dan saling tunggu.

"Sebetulnya kalau saya, kalau dibaca empat fraksi ini, PDIP, NasDem, PKB, dan PKS, memiliki keinginan kuat mendorong hak angket, mereka belum bisa bersatu karena masih ada semacam gap politik. Bisa saja karena mereka berangkat dari dua pasangan yang berbeda," kata Ray di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan, ia bersama koalisi masyarakat sipil bakal terus mendorong agar anggota DPR menggunakan kekuatan mereka melalui hak angket.

Menurut dia, Pemilu 2024 sarat akan praktik nepotisme. Karena itu, ia mendorong agar poin terpenting yang harus masuk pembahasan hak angket apabila digulirkan DPR ialah mendesak dilakukan pemilu ulang tanpa ada Gibran Rakabuming Raka. (Dis/KG/X-3)